



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SAMARINDA
Jalan P. Suryanata Perum Bukit Pinang No. 17 Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda
Laman : baperinda.id, pos-el : bapassamarinda@yahoo.co.id

9 Juli 2026

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kalimantan Timur
di - Samarinda

SURAT PENGANTAR
Nomor : WP.18.PAS.15-PR.01.04-2399

No.	Jenis yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda.	1 (satu) berkas	- Dikirim dengan hormat untuk menjadi pemeriksaan dan guna seperlunya; - Mohon tanda terima lembar kedua dikirim kembali ke BAPAS Kelas I Samarinda.

Diterima tanggal.....

Penerima

.....



NIP.

No. Telepon.....

Pengirim
Kepala,



M. Ilham Agung Setyawan

LAPORAN CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN II – TAHUN 2026



BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SAMARINDA

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi atas pelaksanaan kinerja selama periode April sampai dengan Juni 2026. Seluruh capaian yang disajikan mengacu pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yang mencakup bidang penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, serta pengawasan Klien Pemasyarakatan di wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Selama triwulan ini, Bapas Kelas I Samarinda terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan akuntabel. Segala keberhasilan yang diraih merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan komitmen tinggi dari seluruh jajaran pegawai serta dukungan dari para pemangku kepentingan terkait.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan kinerja di masa depan. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pemasyarakatan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan ini.

Samarinda, 09 Juli 2026
Kepala Balai Pemasyarakatan
Kelas I Samarinda



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

M. Ilham Agung Setyawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
RINGKASAN EKSEKUTIF	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum	5
C. Visi, Misi dan Mandat Strategis	6
D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
E. Maksud dan Tujuan	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	14
B. 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Rencana Strategis	21
B. Capaian 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.....	22
C. e-Monev Bappenas	25
D. Capaian Kinerja Lainnya	28
BAB IV PENUTUP	31
A. Kesimpulan	32
B. Saran	33
LAMPIRAN	35
A. Perjanjian Kinerja Tahun Lalu	36
B. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan	38
C. Dokumentasi	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2 Jumlah Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda Berdasarkan Jabatan

Tabel 3 Jumlah Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda Berdasarkan Jenis Golongan

Tabel 4 Jumlah Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda Berdasarkan Pendidikan

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda

Tabel 6 Keterkaitan Program Aksi dengan Tugas Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda

Tabel 7 Matriks Capaian Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda

Tabel 8 Matriks Capaian Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda

Tabel 9 Matriks Capaian Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda
Gambar 2 Dashboard E-Monev Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda
Gambar 3 Dashboard MyIntress Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda

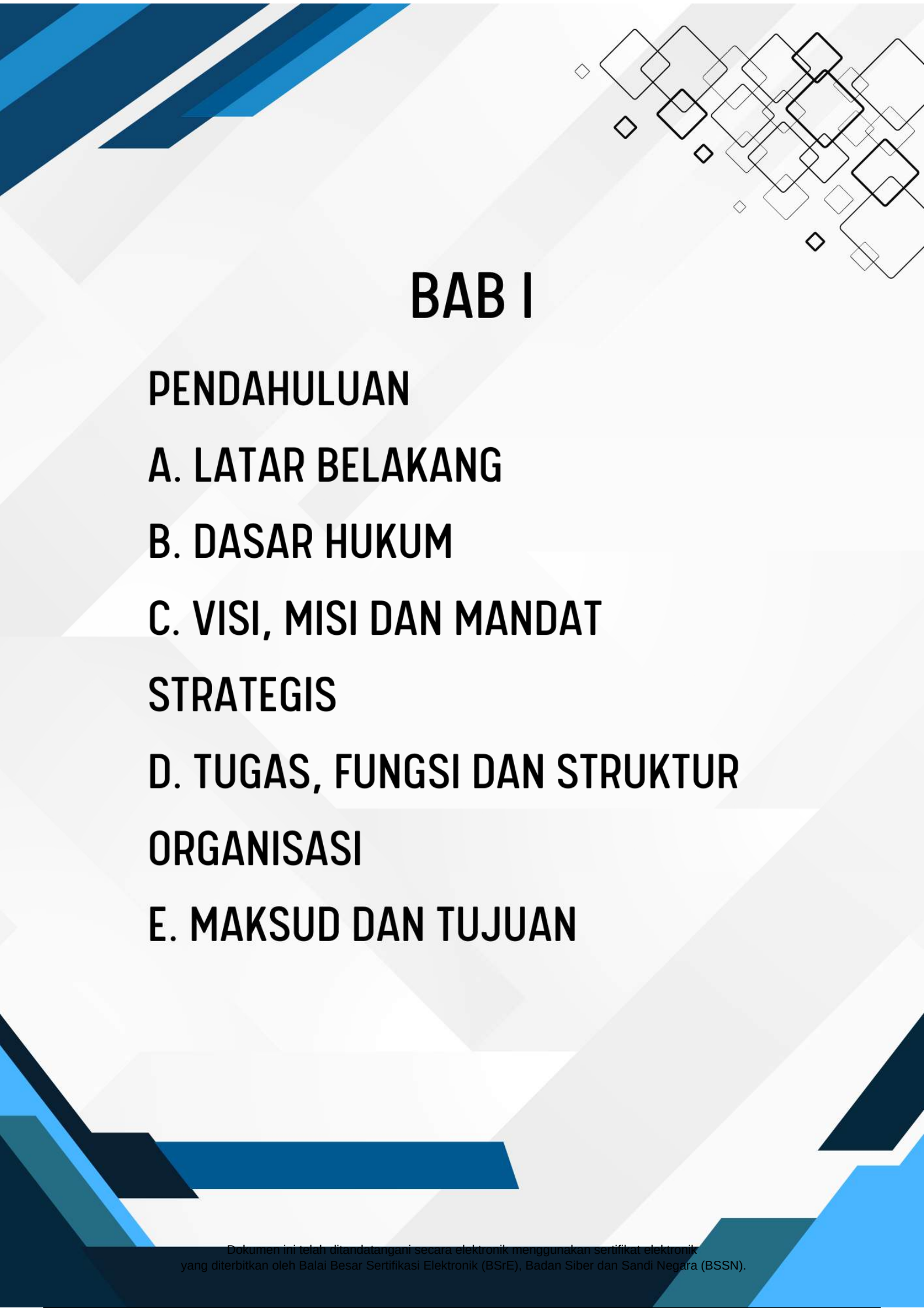
RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Samarinda adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur memegang peran sentral dalam pembimbingan kemasyarakatan, pengawasan klien, dan implementasi keadilan restoratif (restorative justice). Laporan pertengahan tahun 2026 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja teknis substantif dan pengelolaan anggaran negara.

Bapas Samarinda mencatatkan performa positif dengan beberapa indikator strategis berhasil melampaui target: Pendampingan ABH: Mencapai 94,39% (Target: 80%), sukses menekan angka penahanan anak di LPKA. Kesiapan Klien Bermasyarakat: Mencapai 99,50% (Target: 75%), didukung optimalisasi Rumah Singgah Griya Abhiphaya melalui 4 kali program pelatihan kemandirian. Pemberdayaan Masyarakat: Meningkat pesat hingga 62,50% (Target: 25%) dalam mendukung restorative justice. Kepuasan Layanan: Meraih Indeks Kepuasan 3,76 (Target: 3,52) serta predikat "Sangat Puas" pada survei SPAK/SPKP berkat digitalisasi layanan bebas pungli.

Beberapa area berjalan tengah tahun masih memerlukan akselerasi performa: Pendampingan Tahanan Dewasa: Baru 1,38% (Target: 5%) akibat minimnya permintaan formal dari instansi penegak hukum terkait. Penerimaan Mantan Narapidana: Baru 6,48% (Target: 30%) karena tingginya stigma negatif dan resistensi sosial di masyarakat. Reformasi Birokrasi (RB): Berada di angka 50% (Target: 100%), mencerminkan progres pengumpulan data dukung (eviden) yang masih berjalan.

Tata kelola keuangan menunjukkan kinerja yang sangat sehat, disiplin, dan patuh regulasi: Realisasi Belanja: Dari total pagu Rp7,71 Miliar, telah terealisasi sebesar Rp5,24 Miliar (68%) per Juli 2026, berada di atas rata-rata target nasional. e-Monev Bappenas: Kepatuhan pelaporan bulanan mencapai 100% valid (Januari–Juni) dengan progres fisik makro 58,64%. Nilai IKPA: Meraih akumulasi nilai akhir 98,49 (Sangat Baik), dengan nilai sempurna 100,00 pada mayoritas indikator utama (Revisi DIPA, Penyerapan, Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, UP/TUP, Capaian Output). Deviasi minor hanya pada Halaman III DIPA (89,96).



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. DASAR HUKUM

C. VISI, MISI DAN MANDAT STRATEGIS

D. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

E. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Samarinda merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalimantan Timur yang memegang peran sentral dalam siklus peradilan pidana, khususnya pada tahap post-adjudication (setelah putusan) dan penerapan keadilan restoratif (restorative justice). Wilayah kerja Bapas Kelas I Samarinda mencakup area geografis yang luas di Kalimantan Timur, yang menuntut pelayanan prima dalam pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, pembimbingan, pengawasan, serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Secara umum, dalam periode tahun anggaran ini, Bapas Kelas I Samarinda terus berupaya mengadaptasikan layanan pemasyarakatan luar lembaga (community-based correction). Kondisi sosiologis masyarakat yang dinamis, ditambah dengan dinamika pembangunan pasca-transformasi regional di Kalimantan Timur, menuntut Bapas Samarinda untuk tidak hanya sekadar menjalankan tugas administratif, melainkan menjadi motor penggerak reintegrasi sosial yang aman, humanis, dan akuntabel bagi para Klien Pemasyarakatan.

2. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang periode ini, terdapat beberapa isu strategis utama yang menjadi tantangan sekaligus fokus penanganan Bapas Kelas I Samarinda:

- a. Penanganan Overcrowding Lapas/Rutan melalui Reintegrasi: Tingginya angka hunian berlebih (overcrowding) di berbagai Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di wilayah Kalimantan Timur menjadikannya isu krusial. Bapas Samarinda berada di garda depan untuk mengurai kepadatan ini melalui akselerasi pembuatan Litmas guna pemberian hak-hak bersyarat Klien (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Asimilasi) secara tepat waktu dan akurat.

- b. Pengawasan di Wilayah Geografis yang Luas: Kontur wilayah kerja yang luas dengan tantangan aksesibilitas memerlukan akurasi strategi pengawasan. Risiko terjadinya residivisme (pengulangan tindak pidana) memaksa Bapas Samarinda untuk terus mengoptimalkan peran Pos Bapas serta memanfaatkan teknologi informasi dalam memantau perkembangan Klien.
- c. Implementasi UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan: Penguatan regulasi ini memperluas fungsi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam memberikan rekomendasi pidana alternatif non-penjara. Isu utamanya adalah standarisasi kualitas Litmas agar memiliki daya terima yang kuat di tingkat penegak hukum lainnya (Penyidik, Jaksa, Hakim).
- d. Optimalisasi Peran Pokmas Lipas: Keterbatasan anggaran dan sarana bimbingan kemandirian internal menuntut peningkatan sinergi dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas). Isu strategisnya adalah bagaimana membangun kemitraan yang berkelanjutan agar mantan warga binaan dapat langsung terserap dalam lapangan kerja lokal.

3. Urgensi Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ini memiliki urgensi yang sangat mendasar berdasarkan beberapa aspek berikut:

- a. Wujud Akuntabilitas Publik: Sebagai instansi pemerintah, Bapas Kelas I Samarinda wajib mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran negara terhadap output dan outcome kinerja yang dihasilkan secara transparan kepada masyarakat dan basis data evaluasi nasional.
- b. Penyelarasan Target Target Kinerja (Tarja): Laporan ini mendokumentasikan sejauh mana target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahunan telah berhasil direalisasikan, sekaligus mengidentifikasi deviasi jika terjadi kesenjangan antara rencana dan realisasi.

- c. Alat Evaluasi Pengambilan Kebijakan: Laporan ini menjadi dokumen rekam jejak formal untuk mengenali hambatan struktural maupun operasional di lapangan. Hasil analisis dalam laporan ini akan digunakan sebagai landasan perbaikan strategi operasional dan pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya agar lebih efektif dan efisien.

4. Gambaran Pelaksanaan Tugas Selama Periode Pelaporan

Sepanjang periode pelaporan tahun berjalan, Bapas Kelas I Samarinda secara konsisten melaksanakan lima pilar tugas pokok secara simultan, dengan gambaran umum sebagai berikut:

- a. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas): Mengalami tren permintaan yang dinamis, baik Litmas untuk kebutuhan integrasi dewasa, asimilasi, maupun Litmas Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) guna mendukung proses diversi di tingkat penyidikan hingga pengadilan.
- b. Pendampingan: Melakukan pendampingan intensif terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam setiap tingkatan peradilan demi menjamin hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak tetap terpenuhi.
- c. Pembimbingan: Menggulirkan program bimbingan kepribadian (mental, spiritual, kesadaran hukum) serta bimbingan kemandirian (pelatihan kerja/wirausaha) yang bekerja sama dengan berbagai stakeholder eksternal demi menyiapkan kemandirian ekonomi Klien.
- d. Pengawasan: Melaksanakan wajib lapor berkala, baik secara tatap muka (fisik) maupun memanfaatkan pemantauan berbasis digital/komunikasi jarak jauh guna memastikan Klien mematuhi syarat-syarat umum dan khusus selama masa reintegrasi.
- e. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP): Menggelar sidang TPP secara rutin sebagai wadah penilaian objektif dan kolektif sebelum rekomendasi program pembimbingan atau Litmas dinyatakan sah dan dikeluarkan oleh Kepala Bapas.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai dasar penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengatur penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai dasar pembentukan kementerian.
7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang menjadi dasar kedudukan, tugas, dan fungsi Balai Pemasarakatan.
8. Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025, sebagai pedoman teknis penyusunan LKjIP dan laporan capaian kinerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
9. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai Pemasarakatan Kelas I Samarinda, sebagai dasar penetapan sasaran, indikator, target, dan pengukuran capaian kinerja selama tahun berjalan.

C. Visi, Misi dan Mandat Strategis

1. Visi

Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda memiliki visi sebagai berikut:

“Menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan dan Profesional dengan didukung oleh Petugas yang memiliki Kompetensi Tinggi untuk memberikan perlindungan hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan terwujudnya Klien Pemasyarakatan yang berakhlak mulia, mandiri dan taat hukum.”

2. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut, Bapas Kelas I Samarinda mengemban misi utama yang dijabarkan ke dalam poin-poin strategis berikut:

- a. Memberikan perlindungan khusus kepada Anak, terutama perlindungan hukum dalam Sistem Peradilan demi kepentingan terbaik bagi Anak.
- b. Terwujudnya Klien Pemasyarakatan yang berakhlak mulia, mandiri, trampil dan taat hukum.
- c. Membangun kelembagaan yang professional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mengedepankan hukum dan hak asasi manusia.
- d. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
- e. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholders.

3. Mandat Strategis

Mandat strategis merupakan kewenangan hukum, dan tanggung jawab besar yang diberikan oleh negara kepada Bapas Kelas I Samarinda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mandat strategis tersebut meliputi:

- a. Mandat Penegakan Keadilan Restoratif (Restorative Justice): Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Bapas Samarinda dimandatkan untuk mengawal proses diversi dan memberikan rekomendasi non-penjara bagi anak maupun dewasa guna memulihkan harmoni sosial, bukan sekadar menghukum.
- b. Mandat Pengurangan Kepadatan Lapas/Rutan (Overcrowding Mitigation): Bapas mengemban mandat krusial untuk mempercepat dan memperluas akses program reintegrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Asimilasi) secara akuntabel melalui instrumen Litmas dan asesmen risiko/kebutuhan yang presisi.
- c. Mandat Perlindungan Masyarakat (Public Safety): Melalui fungsi pengawasan yang ketat dan pembimbingan yang terukur, Bapas dimandatkan untuk memastikan bahwa Klien Pemasyarakatan yang berada di tengah masyarakat tidak mengulangi tindak pidana (residivisme), sehingga ketertiban dan keamanan wilayah Samarinda dan sekitarnya tetap terjaga.
- d. Mandat Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas) terhadap klien pemasyarakatan sebagai bagian dari persiapan pembimbingan dan pengawasan.

- b. Memberikan pendampingan klien dalam tahapan pra-adjudikasi (sebelum putusan), adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan.
- c. Menyusun dan melaksanakan program pembimbingan kemasyarakatan bagi klien, termasuk pemberian bekal keterampilan, sosial, mental agar klien dapat beradaptasi kembali ke masyarakat.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan syarat, kewajiban atau program klien yang sedang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan (misalnya klien yang menjalani pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pembebasan bersyarat) untuk memastikan klien memenuhi persyaratan dan tidak mengulangi tindak pidana.
- e. Melakukan pelaporan, dokumentasi dan pengelolaan data klien kemasyarakatan (registrasi, pencatatan, pelaporan hasil pembimbingan) sebagai bagian dari tugas administratif Bapas.

2. Fungsi

Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien (dewasa dan anak) — yakni pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan klien selama proses pra-adjudikasi, adjudikasi, pasca-adjudikasi dan bimbingan lanjutan.
- b. Mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berorientasi reintegrasi sosial dan keadilan restoratif, sesuai dengan tujuan UU 22/2022: meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan/klien agar tidak mengulangi tindak pidana, serta perlindungan hak asasi manusia.
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait (misalnya aparat penegak hukum, masyarakat, instansi sosial) agar pembimbingan kemasyarakatan berjalan efektif.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan regulasi kelembagaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk Bapas Kelas I, struktur organisasi Bapas Kelas I Samarinda dipimpin oleh seorang Kepala Bapas (Eselon III.a) dan dibantu oleh para Pejabat Struktural (Eselon IV.a dan Eselon V) serta Kelompok Jabatan Fungsional, Struktur organisasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda

- Sub Bagian Tata Usaha, Sebagai bagian yang menangani tugas fasilitatif, Sub Bagian Tata Usaha dibagi menjadi 3 (tiga) bidang urusan yang dipimpin oleh seorang kepala yaitu Urusan Umum, Urusan Keuangan dan Urusan Kepegawaian. Dalam menjalankan tugasnya Sub Bagian Tata Usaha ini mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu : Melakukan urusan kepegawaian, Melakukan urusan keuangan dan Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
- Seksi Bimbingan Klien Dewasa menjalankan tugas dalam bidang substantif teknis. Dalam menjalankan tugasnya, Seksi Bimbingan Klien Dewasa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa, Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa dan Sub Seksi Bimbingan Kerja Klien Dewasa. Fungsi dari Seksi Bimbingan Klien Dewasa adalah sebagai berikut : Melakukan registrasi Klien Dewasa, Melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk bahan

peradilan dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan dan memberikan bimbingan kemasyarakatan kepada klien Dewasa dan Memberikan bimbingan kerja Klien Dewasa.

- c. Seksi Bimbingan Klien Anak juga menjalankan tugas dalam bidang substantif teknis. Dalam menjalankan tugasnya, Seksi Bimbingan Klien Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Seksi Registrasi Klien Anak, Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Anak dan Sub Seksi Bimbingan Kerja Klien Anak. Fungsi dari Seksi Bimbingan Klien Anak adalah sebagai berikut : Melakukan registrasi Klien Anak, Melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan dan memberikan bimbingan kemasyarakatan kepada klien Anak dan Memberikan bimbingan kerja Klien Anak.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda pada tahun 2026 didukung oleh Sumber Daya Manusia sejumlah 46 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1 Jumlah Sumber Daya Manusia di
Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	30 Orang
2.	Perempuan	16 Orang
Total		46 Orang

**Tabel 2 Jumlah Sumber Daya Manusia di
Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda Berdasarkan Jabatan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Penjabat Struktural	13 Orang
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	27 Orang
3.	Pelaksana	6 Orang
Total		46 Orang

**Tabel 3 Jumlah Sumber Daya Manusia di
Balai Pemasarakatan Kelas I Samarinda Berdasarkan Jenis Golongan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	2 Orang
3.	Golongan III	39 Orang
4.	Golongan IV	5 Orang
Total		46 Orang

**Tabel 4 Jumlah Sumber Daya Manusia di
Balai Pemasarakatan Kelas I Samarinda Berdasarkan Pendidikan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	SMA/SMK	5 Orang
2.	D-IV/S-1	36 Orang
3.	S-2	5 Orang
Total		46 Orang

E. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

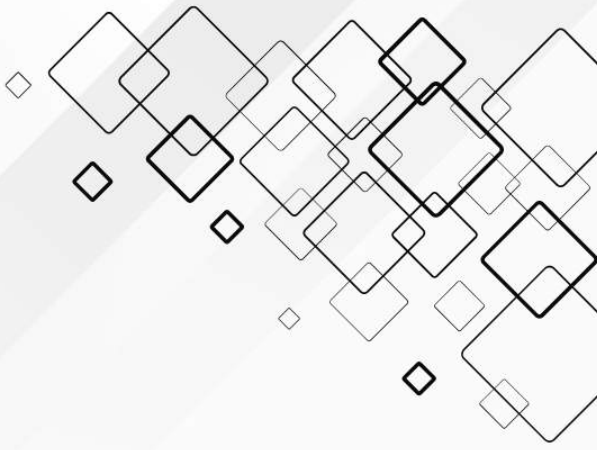
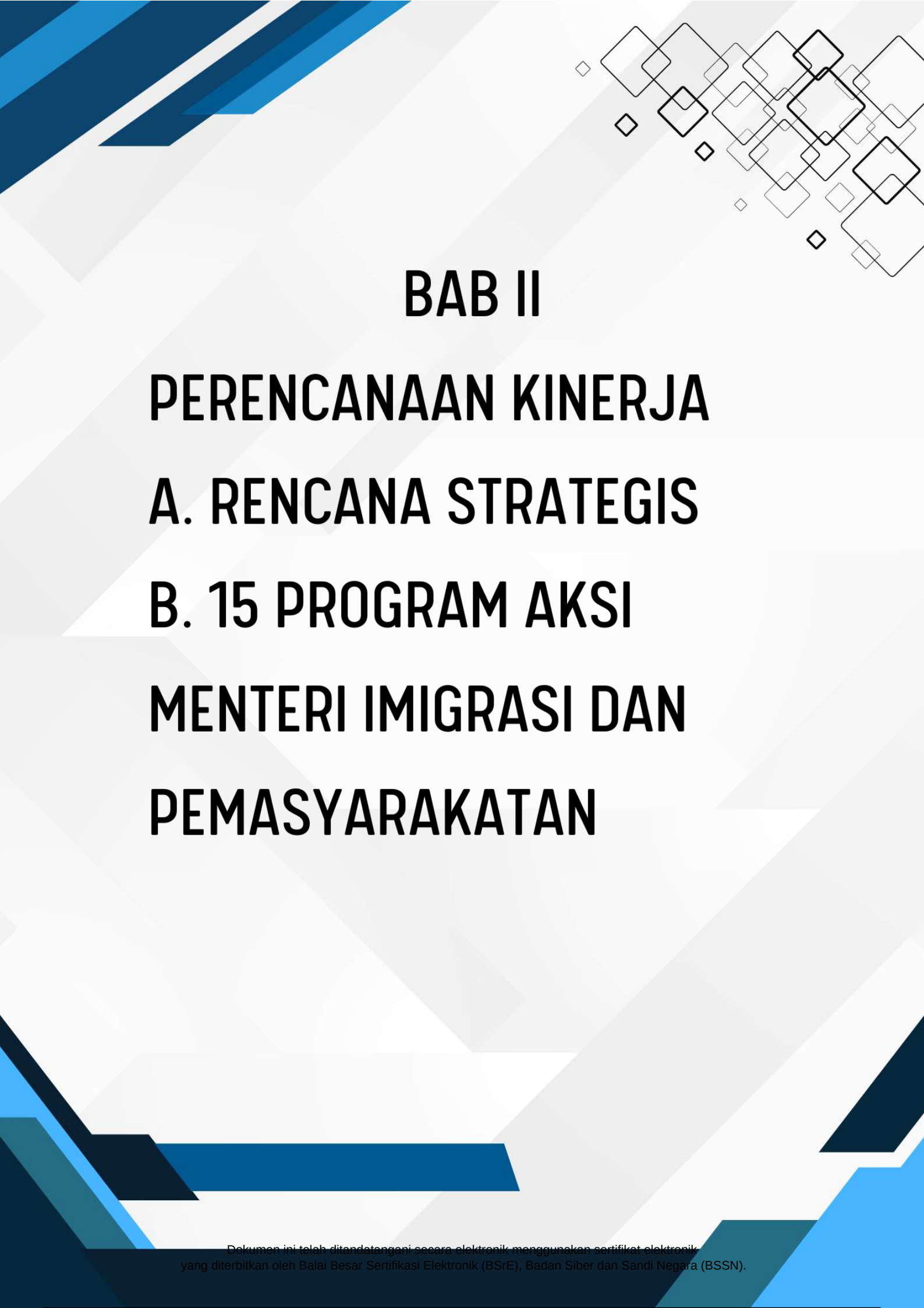
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Samarinda ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen pertanggungjawaban yang komprehensif, transparan, dan akuntabel mengenai seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan penyerapan anggaran selama satu periode tahun anggaran berjalan.

Secara internal, laporan ini disusun sebagai instrumen pengukuran untuk menilai sejauh mana efisiensi dan efektivitas kerja yang telah dicapai oleh setiap seksi dan jajaran fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Secara eksternal, laporan ini menjadi sarana kendali akuntabilitas kinerja kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, serta masyarakat luas.

2. Tujuan

Adapun tujuan mendasar yang ingin dicapai melalui penyusunan laporan capaian kinerja ini adalah:

- a. Menilai Tingkat Capaian Kinerja (Performance Assessment): Mengukur secara kuantitatif dan kualitatif tingkat keberhasilan target operasional Bapas, seperti ketepatan waktu penyelesaian Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), persentase keberhasilan pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta efektivitas pengawasan Klien guna menekan angka residivisme.
- b. Mengevaluasi Keselarasan Anggaran dan Output: Menganalisis tingkat penyerapan anggaran keuangan terhadap realisasi fisik di lapangan, guna memastikan prinsip value for money (ekonomis, efisien, dan efektif) telah diterapkan dengan baik.
- c. Mengidentifikasi Hambatan dan Kendala Lapangan: Memetakan secara detail berbagai permasalahan yang dihadapi selama periode pelaporan—baik kendala geografis wilayah Samarinda dan sekitarnya, keterbatasan SDM, maupun dinamika regulasi—sekaligus merumuskan solusi pemecahannya.
- d. Menyediakan Rekomendasi Strategis Masa Depan: Memberikan masukan data yang valid dan objektif bagi pimpinan instansi dalam menyusun perencanaan strategis, kebijakan operasional, dan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran pada tahun anggaran berikutnya.
- e. Mendukung Penguatan Zona Integritas: Menjadi bukti empiris pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Bapas Kelas I Samarinda dalam rangka pelayanan publik yang bersih, inovatif, dan bebas dari korupsi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

B. 15 PROGRAM AKSI

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis ini merupakan dokumen pedoman lima tahunan (2025-2029) yang disusun untuk mengarahkan tugas pokok dan fungsi Bapas Kelas I Samarinda agar selaras dengan visi, misi, dan Prioritas Nasional Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasarakatan menuju Indonesia Emas 2045.

1. Landasan Visi, Misi, dan Nilai Utama

- a. Visi: Mendukung terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan pamasarakatan yang berintegritas, berkeadilan, serta mendukung keamanan nasional.
- b. Misi: Fokus pada penegakan hukum dan pelayanan yang adil dan humanis (Asta Cita 1) serta perwujudan tata kelola kelembagaan yang modern, profesional, dan berintegritas (Asta Cita 7).
- c. Nilai Budaya Kerja: Menginternalisasi budaya kerja PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel).

2. Kondisi Umum, Potensi, dan Tantangan Organisasi

- a. Kapasitas Internal: Bapas Kelas I Samarinda didukung oleh 46 orang pegawai aktif (30 Juni 2026). Hingga 30 Juni 2026, Bapas menangani beban kerja substantif yang besar, mencakup bimbingan terhadap 3.854 Klien Dewasa dan 31 Klien Anak, serta penyelesaian ribuan dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).
- b. Aset Organisasi: Total nilai aset Barang Milik Negara (BMN) tercatat sebesar Rp. 24,822,082,321.- yang didominasi oleh aset tanah dan peralatan mesin.
- c. Potensi Utama: Adanya peluang penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai ujung tombak Sistem Peradilan Pidana Terpadu seiring dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2022 (UU Pemasarakatan) dan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang mengedepankan keadilan restoratif dan pidana alternatif.
- d. Permasalahan Utama: Tingginya beban kerja PK yang tidak sebanding dengan kuantitas SDM, keterbatasan sarana prasarana

operasional lapangan/digital, luasnya wilayah kerja (mencakup 2 Kotamadya dan 5 Kabupaten), serta adanya stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana.

- e. Aspirasi Masyarakat: Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Kualitas Pelayanan (SPKP) Per Juni 2026 Bapas Samarinda secara meraih predikat "Sangat Puas", menunjukkan indeks kepuasan publik yang tinggi.

3. Target Kinerja Strategis (2025-2029)

Bapas Kelas I Samarinda menetapkan target peningkatan kinerja secara bertahap setiap tahunnya, antara lain:

- a. IKK 10.1 & 10.2 (Pendampingan): Persentase tahanan yang didampingi ditargetkan naik dari 2,5% (2025) menjadi 12,5% (2029), dan pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) naik dari 75% menjadi 95%.
- b. IKK 11.1 (Reintegrasi): Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat ditargetkan meningkat dari 70% hingga mencapai 90% pada tahun 2029.
- c. IKK 12.1 & 12.2 (Penerimaan Masyarakat): Tingkat penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana ditargetkan naik dari 25% ke 45%, serta tingkat pemberdayaan masyarakat dalam keadilan restoratif ditargetkan naik dari 20% ke 40%.

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda Tahun 2026 merupakan bentuk komitmen nyata dan tolok ukur akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Penyusunan target kinerja dan alokasi anggaran tahun 2026 didasarkan pada prinsip efisiensi anggaran dan efektivitas hasil (result-oriented government). Secara komprehensif, berikut sasaran, target indikator, serta keterkaitan pendanaan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026:

**Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2026
Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan Dalam Proses Peradilan Dan Diluar Peradilan	1. Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Pendampingan	5%	Rp. 0,-
		2. Persentase Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Yang Mendapatkan Pendampingan	80%	
2.	Meningkatnya Klien Pemasyarakatan Yang Sudah Siap Bermasyarakat	1. Persentase Klien Pemasyarakatan Yang Siap Bermasyarakat	75%	
3.	Meningkatnya Penerimaan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial	1. Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana Dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial	30%	
		2. Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif	25%	
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	100%	Rp. 7.936.674.000
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Upt Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di Upt Masing-Masing	3,52	

5. Kerangka Pendanaan dan Peta Jalan (Roadmap)

Kerangka Pendanaan: Proyeksi anggaran disusun secara akuntabel untuk mendukung program pelayanan pemasyarakatan dan dukungan manajemen, dengan rata-rata total alokasi berkisar antara Rp4,3 Miliar hingga Rp5,6 Miliar per tahunnya (tergantung dinamika belanja pegawai dan operasional).

Strategi Peta Jalan (Roadmap): Fokus kerja lima tahun ke depan diarahkan pada:

- a. Pembangunan fisik dan pengembangan program Griya Abhiphraya.
- b. Pengadaan perangkat teknologi data dan fasilitas perkantoran modern.
- c. Perluasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berkelanjutan dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas LIPAS), Pemda, Balai Latihan Kerja (BLK), dan Perguruan Tinggi.
- d. Penataan kelembagaan, penerapan manajemen risiko terpadu, dan digitalisasi pelayanan berbasis aplikasi (SDP/SPPT-TI) guna meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Melalui Renstra 2025-2029 ini, Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda berkomitmen penuh untuk mengatasi keterbatasan internal melalui digitalisasi layanan, penguatan kompetensi SDM, penekanan manajemen risiko, dan kolaborasi lintas sektor guna menyukseskan implementasi hukum humanis dan pemulihan kesatuan hidup klien di masyarakat.

B. 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda berkewajiban penuh untuk mengimplementasikan 15 Program Aksi Menteri. Mengingat karakteristik Bapas yang berfokus pada pembimbingan kemasyarakatan, pengawasan, pendampingan, dan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), program aksi tersebut diterjemahkan secara kontekstual guna mendukung penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan. Berikut adalah penjelasan mengenai target, strategi pelaksanaan, dan keterkaitan program aksi tersebut dengan tugas unit kerja Bapas Kelas I Samarinda:

1. Target Capaian Program Aksi di Bapas Kelas I Samarinda

- a. Penguatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice): Meningkatkan persentase keberhasilan diversi pada anak dan penerapan pidana alternatif bagi pelaku dewasa sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2022 dan KUHP Baru.

- b. Pemberdayaan dan Kemandirian Klien: Menargetkan minimal 75% klien masyarakat memiliki kesiapan kerja atau kemampuan berwirausaha mandiri agar siap berintegrasi kembali ke masyarakat.
- c. Nol Residivisme dan Pelanggaran Hukum: Menekan angka pengulangan tindak pidana oleh klien bimbingan Bapas Samarinda melalui pengawasan yang ketat dan terukur.
- a. Transparansi Layanan Bebas Pungli: Mewujudkan pelayanan publik digital yang akuntabel, dibuktikan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang prima serta pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

2. **Strategi Pelaksanaan pada Unit Kerja**

Untuk mewujudkan target di atas, Bapas Kelas I Samarinda menerapkan empat strategi operasional terpadu:

- a. Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK): Menugaskan PK Bapas sebagai aktor kunci dalam memberikan rekomendasi objektif melalui dokumen Litmas di setiap tahapan peradilan, mulai dari pra-ajudikasi, adjudikasi, hingga pasca-ajudikasi.
- b. Revitalisasi dan Pengembangan Griya Abhiphaya: Mengoptimalkan fungsi rumah singgah Griya Abhiphaya sebagai pusat pemberdayaan, pelatihan kerja, dan asimilasi bagi klien masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif.
- c. Perluasan Jejaring Pokmas LIPAS: Menggandeng lebih banyak Kelompok Masyarakat Peduli Masyarakat, instansi pemerintah daerah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Balai Latihan Kerja (BLK), dan sektor swasta di wilayah Samarinda dan sekitarnya.
- d. Integrasi Sistem Digital (SDP dan SPPT-TI): Mengakselerasi pertukaran data perkara secara nirkertas (paperless) dengan aparat penegak hukum lain guna mempercepat proses pendampingan dan reintegrasi (PB, CB, CMB, Asimilasi).

3. **Keterkaitan Program Aksi dengan Tugas Unit Kerja Bapas Samarinda**

Pelaksanaan 15 Program Aksi Menteri memiliki keterkaitan erat dan melekat pada tugas fungsi substantif Bapas Kelas I Samarinda, yang dipetakan sebagai berikut:

**Tabel 6 Keterkaitan Program Aksi dengan Tugas
Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda**

Rumpun Program Aksi Menteri	Tugas Pokok Fungsi Bapas Samarinda
1. Penegakan Hukum Berkeadilan & Keadilan Restoratif	a. Pembuatan Dokumen Litmas b. Pendampingan Anak (ABH) c. Pendampingan Tahanan Dewasa
2. Pemberdayaan Masyarakat & Reintegrasi Sosial	a. Pembimbingan Kepribadian b. Pembimbingan Kemandirian c. Pengawasan Klien
3. Pencegahan Peredaran Narkoba & Penyakit Sosial	a. Pengawasan Klien Luar Lembaga b. Pembimbingan Mental/Spiritual
4. Transformasi Digital & Reformasi Birokrasi	a. Layanan Kesekretariatan b. Layanan Informasi Publik

Implementasi 15 Program Aksi Menteri di Bapas Kelas I Samarinda bertindak sebagai kompas operasional. Program ini mengubah paradigma pemasyarakatan di Samarinda dari yang semula berfokus pada penghukuman (retributive) di dalam Lapas/Rutan, menjadi fokus pada pemulihan kesatuan hubungan hidup antara klien, korban, dan masyarakat (restorative & rehabilitative) di luar lembaga.



BAB III

CAPAIAN KINERJA

A. CAPAIAN RENCANA STRATEGIS

B. CAPAIAN 15 PROGRAM AKSI MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

C. E-MONEV BAPPENAS

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

A. Capaian Rencana Strategis

Evaluasi capaian Rencana Strategis merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas program yang telah dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda. Melalui analisis capaian Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Bapas dapat memetakan area yang telah berjalan optimal serta area yang masih memerlukan intervensi dan perbaikan.

Berikut adalah rincian capaian, analisis, kendala/risiko, serta upaya perbaikan kinerja Bapas Kelas I Samarinda:

1. Matriks Capaian Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Tabel 7 Matriks Capaian Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan Dalam Proses Peradilan Dan Diluar Peradilan	1. Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Pendampingan	5%	1,38
		2. Persentase Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Yang Mendapatkan Pendampingan	80%	94,39%
2.	Meningkatnya Klien Pemasyarakatan Yang Sudah Siap Bermasyarakat	1. Persentase Klien Pemasyarakatan Yang Siap Bermasyarakat	75%	99,50%
3.	Meningkatnya Penerimaan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial	1. Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana Dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial	30%	6,48%
		2. Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif	25%	62,50%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	100%	50%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Upt Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di Upt Masing-Masing	3,52	3,76

2. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan komparasi data Target dan Realisasi pada Triwulan II Tahun 2026, dilakukan analisis mendalam terhadap faktor keberhasilan maupun indikator yang memerlukan akselerasi performa sebagai berikut:

a) Indikator yang Memenuhi/Melampaui Target

Pendampingan ABH: Mencapai 94,39% dari target 80%.

Kesiapan Klien: Mencapai 99,50% dari target 75%.

Pemberdayaan Masyarakat (Restorative Justice): Melonjak hingga 62,50% dari target 25%.

Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan: Meraih skor 3,76 dari target 3,52.

b) Indikator yang Belum Memenuhi Target

Pendampingan Tahanan: Baru terealisasi 1,38% dari target 5%.

Penerimaan Masyarakat (Reintegrasi): Mengalami kesenjangan besar, baru terealisasi 6,48% dari target 30%.

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi: Berada di angka 50% dari target berjalan 100%.

c) Rencana Aksi Pemulihan & Strategi Peningkatan

Akselerasi Pendampingan: Meningkatkan koordinasi dengan rutan dan penyidik hukum untuk menjaring tahanan dewasa yang membutuhkan litmas.

Sosialisasi Reintegrasi: Mengoptimalkan Pokmas Lipas untuk mengedukasi masyarakat tingkat lokal demi mengikis stigma negatif terhadap mantan narapidana.

Pemenuhan Eviden RB: Mempercepat pengumpulan dan pengunggahan dokumen data dukung Reformasi Birokrasi sebelum akhir tahun anggaran.

B. Capaian 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

Sebagai UPT yang bergerak di bidang pembimbingan kemasyarakatan, Balai Pemasarakatan Kelas I Samarinda telah mengintegrasikan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan ke dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sehari-hari.

Secara akumulatif, berikut adalah laporan capaian dari implementasi program aksi tersebut di wilayah kerja Bapas Kelas I Samarinda:

1. **Rincian Capaian Implementasi Berdasarkan Klaster Program**

a. **Klaster Penegakan Hukum Berkeadilan dan Keadilan Restoratif**

Capaian: Bapas Samarinda berhasil mengawal proses peradilan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan persentase keberhasilan rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk diversi dan pidana alternatif mencapai 94,39%. Pendampingan tahanan dewasa dan anak dilakukan secara simultan sejak tahap penyidikan di Kepolisian hingga persidangan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah koordinasi (Samarinda, Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur, dsb).

Dampak: Menekan angka penahanan anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan mengutamakan pemulihan keadilan.

b. **Klaster Pemberdayaan dan Reintegrasi Sosial (Griya Abhiphaya & Pokmas LIPAS)**

Capaian: Bapas Samarinda telah mengoptimalkan peran Rumah Singgah Griya Abhiphaya sebagai pusat unggulan pemberdayaan klien. Melalui kerja sama aktif dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas LIPAS), telah dilaksanakan 4 kali pelatihan kemandirian (seperti Peternakan Telur dan Hidroponik) Penyuluhan Hukum dan Bimbingan Keagamaan yang diikuti oleh total klien bimbingan, dengan tingkat kesiapan bermasyarakat klien mencapai 6,48%.

Dampak: Klien memiliki modal keterampilan nyata untuk berwirausaha sehingga mempermudah mereka diterima kembali oleh lingkungan sosialnya.

c. **Klaster Transformasi Digital Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi**

Capaian: Digitalisasi dokumen melalui aplikasi internal dan revitalisasi penggunaan Sistem Database Pemasarakatan (SDP)

berjalan 100%. Pengurusan litmas integrasi kini dapat dilacak transparan oleh penjamin/keluarga klien. Layanan ini berkontribusi langsung pada raihan Indeks Kepuasan internal dan eksternal sebesar 3,61 serta nihilnya laporan pungutan liar (pungli).

Dampak: Layanan bimbingan dan kesekretariatan yang bersih, cepat, transparan, dan akuntabel.

2. Matriks Evaluasi Capaian Program Aksi

Untuk memberikan gambaran yang scannable, berikut adalah rangkuman hubungan antara target program aksi dengan realisasi operasional di Bapas Kelas I Samarinda:

**Tabel 8 Matriks Capaian Sasaran Kegiatan (SK)
dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda**

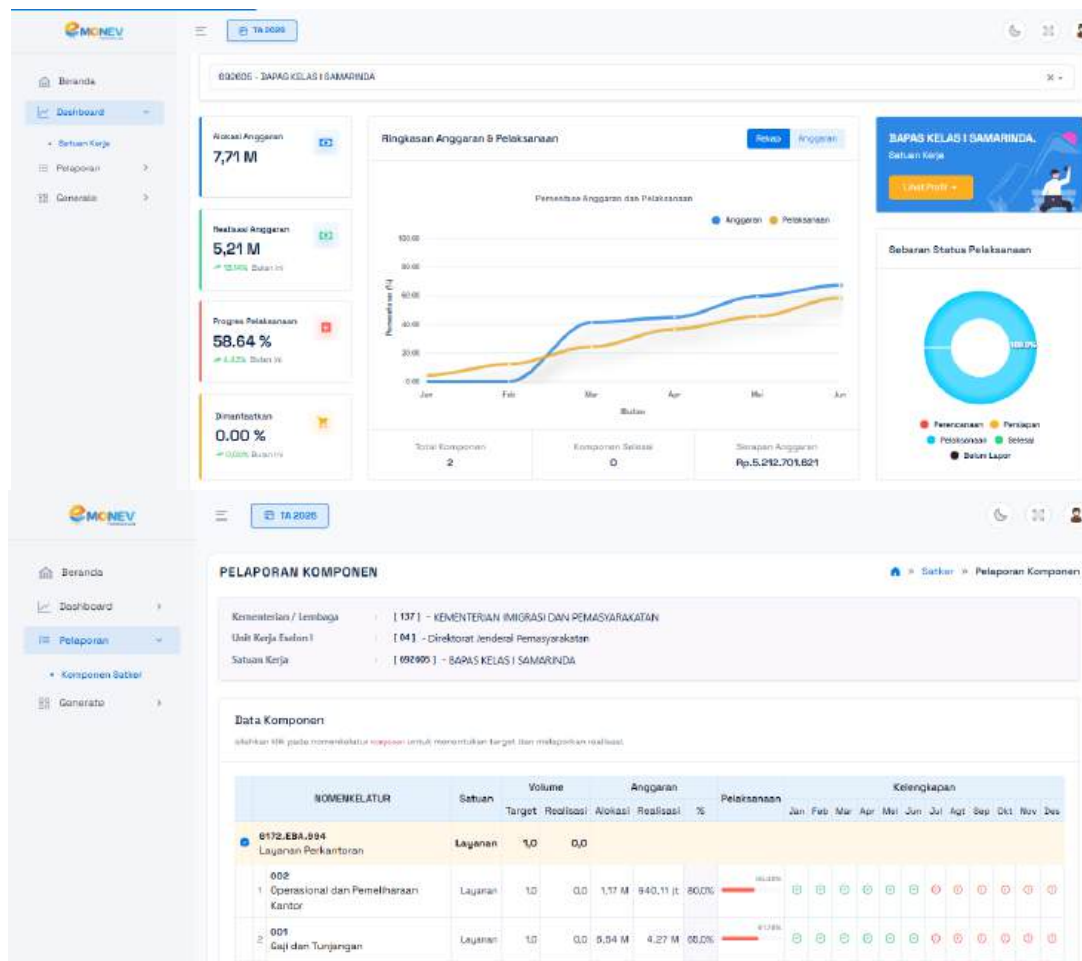
Rumpun Program Aksi Menteri	Tugas Pokok Fungsi Bapas Samarinda	Bentuk Keterkaitan & Implementasi Nyata
1. Penegakan Hukum Berkeadilan & Keadilan Restoratif	a. Pembuatan Dokumen Litmas b. Pendampingan Anak (ABH) c. Pendampingan Tahanan Dewasa	PK Bapas hadir mendampingi anak dalam proses diversi di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Rekomendasi Litmas digunakan hakim sebagai dasar pengambilan keputusan pidana alternatif (non-pemenjaraan).
2. Pemberdayaan Masyarakat & Reintegrasi Sosial	a. Pembimbingan Kepribadian b. Pembimbingan Kemandirian c. Pengawasan Klien	Bapas melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk menyaring klien yang berhak mendapatkan program reintegrasi. Melalui Griya Abhiphraya, klien diberikan pelatihan kerja nyata agar diterima kembali oleh masyarakat sekitar.

3. Pencegahan Peredaran Narkoba & Penyakit Sosial	a. Pengawasan Klien Luar Lembaga b. Pembimbingan Mental/Spiritual	Melakukan pengawasan berkala dan wajib lapor (baik fisik maupun virtual) bagi klien kasus narkoba, serta bekerja sama dengan BNNK Samarinda untuk memastikan klien tidak kembali terjerumus ke dalam lingkaran peredaran gelap narkoba.
4. Transformasi Digital & Reformasi Birokrasi	a. Layanan Kesekretariatan b. Layanan Informasi Publik	Pemanfaatan APPS dan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) untuk transparansi pelacakan status usulan integrasi klien. Hal ini memangkas birokrasi berbelit dan menutup celah pungutan liar (pungli) bagi keluarga klien.

Secara keseluruhan, internalisasi 15 Program Aksi Menteri di Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda telah berjalan sesuai koridor kebijakan pusat. Kendati dihadapkan pada tantangan wilayah geografis kerja yang sangat luas di Kalimantan Timur, pemanfaatan jejaring Pokmas LIPAS dan penguatan fungsi struktural Kesekretariatan mampu menjaga kinerja substantif Bapas tetap berada pada tren positif dan akuntabel.

C. e-Monev Bappenas

Pelaporan e-Monev Bappenas <https://e-monev.bappenas.go.id/> merupakan instrumen kendali untuk memantau keselarasan antara perencanaan nasional, penyerapan anggaran, dan realisasi progres fisik komponen pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda. Berdasarkan penarikan data dasbor e-Monev Bappenas TA 2026, berikut adalah rincian capaian beserta analisisnya:



Gambar 2 Dasboard E-Monev Balai Pemasarakatan Kelas I Samarinda

1. Ringkasan Data Capaian Anggaran dan Pelaksanaan (Kondisi Eksisting)

Berdasarkan data dasbor e-Monev Bappenas, posisi capaian makro Bapas Kelas I Samarinda menunjukkan performa sebagai berikut:

Tabel 9 Matriks Capaian Sasaran Kegiatan (SK)

dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pemasarakatan Kelas I Samarinda

Indikator Performa	Nilai Capaian / Realisasi	Keterangan
1. Alokasi Anggaran	7,71 M	Total pagu yang dikelola pada TA 2026
2. Realisasi Anggaran	5,21 M (Rp5.212.701.621)	Akumulasi serapan belanja hingga bulan berjalan (+13,14% bulan ini)

3. Progres Pelaksanaan (Fisik)	58,64%	Rata-rata kemajuan fisik (+4,43% bulan ini)
4. Dimanfaatkan	0,00%	Status pemanfaatan hasil akhir akhir tahun
5. Total Komponen	2 Komponen	Seluruh komponen berada dalam status "Pelaksanaan" (100%)
6. Komponen Selesai	0 Komponen	Belum ada komponen yang selesai penuh (masih on-going hingga akhir tahun)

2. Rincian Pelaporan Per Komponen Satker

Bapas Kelas I Samarinda mengelola 1 rumpun nomenklatur utama, yaitu 6172.EBA.994 (Layanan Perkantoran) yang diturunkan ke dalam 2 komponen kerja kesekretariatan:

- a. Komponen 002: Operasional dan Pemeliharaan Kantor
 - a) Volume: Target 1,0 Layanan / Realisasi 0,0 Layanan (On-going)
 - b) Anggaran: Alokasi 1,17 M | Realisasi 940,11 Jt (80,0%)
 - c) Progres Pelaksanaan Fisik: 55,48%
 - d) Kelengkapan Data: Pelaporan bulanan telah terisi lengkap dan valid dari bulan Januari hingga Juni.
- b. Komponen 001: Gaji dan Tunjangan
 - a) Volume: Target 1,0 Layanan / Realisasi 0,0 Layanan (On-going)
 - b) Anggaran: Alokasi 6,54 M | Realisasi 4,27 M (65,0%)
 - c) Progres Pelaksanaan Fisik: 61,79%
 - d) Kelengkapan Data: Pelaporan bulanan telah terisi lengkap dan valid dari bulan Januari hingga Juni.

3. Analisis Performa dan Keterkaitan Efisiensi

- a. Konsistensi Trend Belanja vs Fisik: Grafik persentase anggaran dan pelaksanaan menunjukkan tren pertumbuhan linear yang sehat sejak bulan Februari hingga Juni. Tidak terjadi deviasi atau kesenjangan

yang lebar (gap) antara kurva realisasi keuangan (ke atas) dengan kurva progres pelaksanaan fisik, yang menandakan penyerapan anggaran berjalan selaras dengan hasil fisik di lapangan.

- b. Efisiensi Belanja Operasional Kantor: Komponen 002 (Operasional) mencatatkan persentase serapan anggaran yang cukup tinggi yaitu 80,0%, namun dengan progres pelaksanaan fisik sebesar 55,48%. Hal ini wajar terjadi di pertengahan tahun anggaran karena adanya pemenuhan kontrak serta pemeliharaan sarana prasarana penunjang operasional seperti gedung dan bangunan.
- c. Ketetapan Gaji dan Tunjangan: Komponen 001 berjalan stabil dengan serapan 65,0% dan fisik 61,79%, merefleksikan pembayaran hak belanja pegawai Bapas Samarinda yang tepat waktu setiap bulannya tanpa kendala administratif.

4. Kendala, Risiko, dan Tindakan Perbaikan

Kendala/Risiko Penyerapan Akhir Tahun: Berdasarkan data kelengkapan per Juli, pelaporan untuk sisa bulan (Juli hingga Desember) masih berstatus merah/belum waktunya lapor (on schedule). Risiko yang diantisipasi adalah potensi perlambatan serapan operasional pada Triwulan IV jika tidak dipantau secara berkala.

Rencana Aksi/Upaya Perbaikan: Melakukan koordinasi intensif dengan pengelola keuangan untuk mempercepat penyelesaian sisa dokumen pertanggungjawaban belanja operasional kantor. Dan Mempertahankan kedisiplinan pengisian aplikasi e-Monev Bappenas setiap awal bulan secara konsisten agar tidak terjadi keterlambatan pelaporan data dukung ke tingkat wilayah maupun pusat.

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. Realisasi Anggaran

Pelaporan Realisasi Anggaran <https://myintress.kemenkeu.go.id/> dan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan refleksi atas tingkat kualitas tata kelola keuangan, efisiensi, serta kepatuhan regulasi pelaksanaan anggaran pada Balai Pemasarakatan Kelas I Samarinda.



Gambar 3 Dasboard MyIntress Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda

a. Laporan Realisasi Belanja

Berdasarkan ringkasan eksekutif pada dasbor MyIntress posisi data per 07 Juli 2026, performa realisasi belanja Bapas Kelas I Samarinda menunjukkan capaian sebagai berikut:

- Total Pagu Anggaran: Rp7.714.621.000
- Realisasi Belanja: Rp5.245.911.304
- Sisa Pagu Anggaran: Rp2.468.709.696
- Persentase Total Realisasi Belanja: 68%

Catatan Tambahan: Khusus realisasi murni yang telah dibukukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 pukul 08.55 WIB adalah sebesar Rp5.015.345.616. Secara umum, serapan anggaran yang menyentuh angka 60,83% di bulan Juni menunjukkan akselerasi belanja yang sangat sehat dan berada di atas target minimal triwulanan nasional.

2. Matriks Capaian Nilai IKPA (Sampai dengan Juni)

Berdasarkan hasil penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) tingkat Satker, Bapas Kelas I Samarinda mendapatkan akumulasi nilai akhir yang sangat tinggi. Berikut adalah rincian nilai per indikator:

Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker

Filter

PDF

KLSA

Filter Aktif: 1 Sampul Dengan Jumlah

Carilah data disini...

INDOK	KODE KPM	KODE SA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOKOT	KEMEMPULUAN SPM (PENGURANGAN)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL KONVERSI BOKOT)	
						REVISI BOKOT	REVISI REALISASI BOKOT	NILAI AKHIR	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TUNJANGAN	PENYELESAIAN UP GAKUP	NILAI AKHIR	CAPAIAN OUTPUT					NILAI AKHIR
1	001	137	BP2026	BAPAS KELAS I SAMARINDA	NILAI BOKOT NILAI AKHIR	100,00 10,00	88,99 71,43	94,99	100,00 20,00	100,00 10,00	100,00 10,00	100,00 10,00	100,00 25,00	100,00 25,00	100,00	98,49	100,00%	0,00	98,49

Gambar 4 Dasboard IKPA Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda

Analisis Performa IKPA Bapas Kelas I Samarinda:

- Kesempurnaan Hasil dan Eksekusi (Nilai 100): Bapas Kelas I Samarinda berhasil menyapu bersih nilai 100,00 pada mayoritas

indikator utama, yaitu Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, dan Capaian Output. Hal ini membuktikan bahwa manajemen bendahara dan pejabat pembuat komitmen (PPK) sangat disiplin dalam menepati norma waktu pencairan dana serta penyelesaian tagihan pihak ketiga secara tepat waktu tanpa adanya penumpukan berkas di akhir bulan.

- b. Analisis Deviasi Halaman III DIPA (Nilai 89,96): Satu-satunya area yang belum menyentuh angka maksimal adalah indikator Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai 89,96. Nilai ini mengindikasikan masih adanya sedikit pergeseran atau ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana bulanan (RPD) yang disusun di awal tahun dengan realisasi pencairan riil pada bulan-bulan berjalan. Meskipun demikian, angka mendekati 90 ini masih tergolong dalam kategori deviasi yang sangat aman dan terkendali.
- c. Kepatuhan Regulasi (Dispensasi SPM 0,00): Nilai pengurang dispensasi SPM sebesar 0,00 menunjukkan kepatuhan 100% terhadap kalender anggaran (termasuk batas akhir pengajuan kontrak/tagihan), sehingga Satker sama sekali tidak memerlukan dispensasi keterlambatan dari KPPN.

Kesimpulan dan Tindakan Perbaikan Rekomendasi Dengan nilai akhir 98,49, kinerja keuangan Bapas Kelas I Samarinda berada pada level Sangat Baik dan melampaui rata-rata kinerja nasional. Penguatan Kalender RPD: Menginstruksikan kepada pengelola keuangan untuk melakukan review bulanan terhadap Halaman III DIPA agar rencana penarikan dana di sisa Triwulan III dan IV lebih presisi, sehingga nilai deviasi dapat ditingkatkan mendekati 100.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

A. Kesimpulan

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Samarinda menunjukkan performa yang sangat baik dan akuntabel sepanjang pertengahan tahun anggaran 2026, yang tercermin dari integrasi keberhasilan pelayanan teknis substantif dan tata kelola keuangan negara.

Pada aspek Pelayanan Teknis dan Program Aksi Menteri, Bapas Samarinda mencatatkan lompatan performa yang melampaui target pada beberapa indikator kunci. Pendampingan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) mencapai 94,39% (Target 80%) demi mendukung keadilan restoratif dan menekan angka penahanan anak di LPKA. Program reintegrasi sosial juga berjalan optimal dengan tingkat kesiapan klien bermasyarakat sebesar 99,50% (Target 75%) didukung penguatan Rumah Singgah Griya Abhiphraya yang telah melaksanakan 4 kali pelatihan kemandirian. Selain itu, keterlibatan aktif Pokmas LIPAS sukses mendorong pemberdayaan masyarakat hingga 62,50% (Target 25%), serta pemanfaatan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) berhasil mewujudkan digitalisasi layanan 100% tanpa pungli yang menghasilkan Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan sebesar 3,76 (Target 3,52).

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang memerlukan akselerasi, antara lain rendahnya pendampingan tahanan dewasa yang baru mencapai 1,38% (Target 5%) akibat minimnya permintaan formal, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana yang masih rendah di angka 6,48% (Target 30%) karena tebalnya stigma sosial. Di sisi administrasi kewilayahan, capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) berada di angka 50% (Target 100%) sebagai cerminan dari progres berjalan tengah tahun. Langkah pemulihan difokuskan pada penguatan koordinasi penjemputan data tahanan dengan rutan/penyidik, kampanye anti-stigma bersama Pokmas LIPAS, serta percepatan pengunggahan dokumen data dukung RB.

Dari aspek Akuntabilitas Keuangan dan Kepatuhan Nasional, Bapas Samarinda mengelola total pagu anggaran sebesar Rp7,71 Miliar. Berdasarkan pelaporan e-Monev Bappenas untuk nomenklatur Layanan Perkantoran, tingkat kepatuhan pengisian data dari Januari hingga Juni

mencapai 100% valid dengan rata-rata progres pelaksanaan fisik makro sebesar 58,64% dan serapan anggaran dasbor sebesar Rp5,21 Miliar. Sementara itu, berdasarkan data riil aplikasi MyIntress per Juli 2026, akumulasi realisasi belanja total telah menyentuh angka Rp5.245.911.304 atau sebesar 68% dari pagu, sebuah tren serapan yang sangat sehat di atas rata-rata target minimal nasional. Atas kedisiplinan dan kualitas eksekusi anggaran tersebut, Bapas Samarinda dianugerahi Nilai Akhir IKPA sangat tinggi sebesar 98,49 (Sangat Baik) dengan nilai sempurna 100,00 pada mayoritas indikator utama, di mana satu-satunya area evaluasi minor hanya terletak pada koordinasi Deviasi Halaman III DIPA (88,96) yang akan terus ditingkatkan akurasi pada sisa triwulan berjalan.

B. SARAN

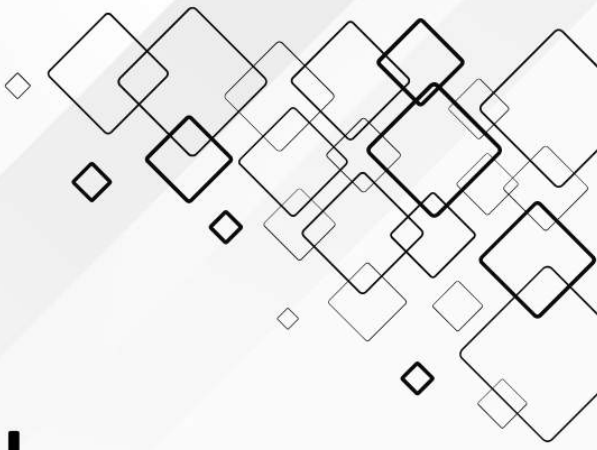
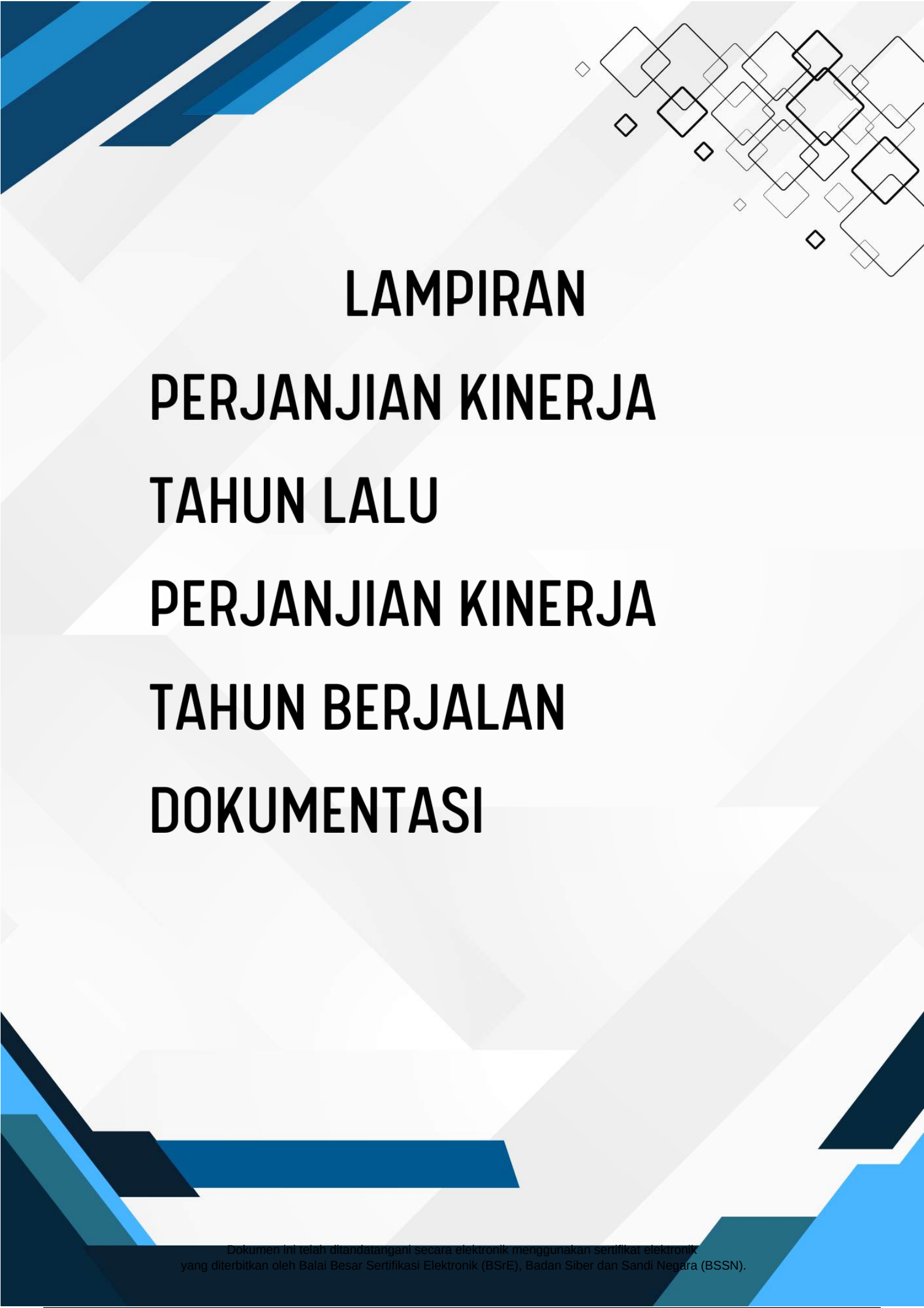
Guna memulihkan indikator kinerja yang belum memenuhi target, mempercepat Reformasi Birokrasi, serta mempertahankan kualitas tata kelola keuangan yang sudah berjalan sangat baik, Balai Pemasarakatan Kelas I Samarinda direkomendasikan untuk menerapkan Strategi "Tiga Pilar Akselerasi" secara simultan pada sisa tahun anggaran 2026:

Pilar 1: Sinkronisasi Layanan Teknis dan Pengikisan Stigma Sosial (Substantif) Bapas Samarinda harus segera membangun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih erat dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Rutan di wilayah kerja untuk menerapkan sistem jemput bola penjemputan data tahanan, sehingga keterlambatan permintaan Litmas dewasa dapat teratasi. Secara bersamaan, keberhasilan program kemandirian di Rumah Singgah Griya Abhiphraya wajib diampifikasi melalui kolaborasi aktif bersama Pokmas LIPAS untuk menggelar sosialisasi anti-stigma berbasis komunitas (melibatkan RT/RW, tokoh agama, dan pelaku usaha lokal) guna membuktikan bahwa klien pemsarakatan telah memiliki keahlian UMKM bersertifikat, yang pada akhirnya akan mendongkrak angka penerimaan mantan narapidana di masyarakat.

Pilar 2: Kedisiplinan Periodik Tata Kelola Administrasi (Reformasi Birokrasi) Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) harus menghentikan pola pengumpulan data di akhir tahun dan beralih ke sistem monitoring mandiri secara bulanan untuk mencicil pengunggahan dokumen data dukung (eviden) Reformasi Birokrasi, sehingga target rencana aksi RB dapat segera

terpenuhi dan naik dari angka 50% menuju 100% pada Triwulan III dan IV.

Pilar 3: Presisi Rencana Penarikan Dana dan Mitigasi Belanja (Keuangan) Pengelola Keuangan (PPK dan Bendahara) wajib melakukan re-proyeksi dan penajaman akurasi pada Halaman III DIPA guna menyelaraskan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan dengan realisasi riil di lapangan demi mengejar nilai IKPA yang sempurna. Selain itu, mengingat serapan anggaran riil sudah sangat sehat mencapai 68%, sisa pagu operasional dan pemeliharaan kantor harus segera dieksekusi sebelum memasuki Triwulan IV untuk menghindari risiko penumpukan tagihan atau keterlambatan laporan pada akhir tahun anggaran.



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN LALU

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN BERJALAN

DOKUMENTASI

A. Perjanjian Kinerja Tahun Lalu



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ilham Agung Setyawan
Jabatan : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Samarinda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Endang Lintang Hardiman
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kalimantan Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

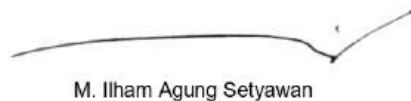
Samarinda, 1 Desember 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasarakatan Kalimantan Timur



Endang Lintang Hardiman

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I
Samarinda



M. Ilham Agung Setyawan

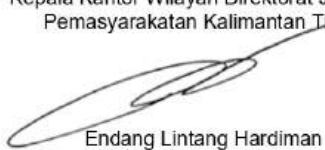
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SAMARINDA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	1. Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	2,5%
		2. Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	75%
2.	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	1. Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	70%
3.	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	1. Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	25%
		2. Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	20%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp.1.002.583.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp.3.986.626.000,-

Samarinda, 1 Desember 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kalimantan Timur


Endang Lintang Hardiman

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I
Samarinda


M. Ilham Agung Setyawan

B. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ilham Agung Setyawan

Jabatan : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Samarinda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Endang Lintang Hardiman

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan
Kalimantan Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasarakatan Kalimantan Timur

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I
Samarinda

Endang Lintang Hardiman

M. Ilham Agung Setyawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SAMARINDA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KALIMANTAN TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	1. Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	5%
		2. Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	80%
2.	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	1. Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	75%
3.	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	1. Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	30%
		2. Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	25%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,52

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. -
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 7.714.621.000,-

Samarinda, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kalimantan Timur

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I
Samarinda


Endang Lintang Hardiman


M. Ilham Agung Setyawan

C. Dokumentasi







BAPERINDA
NEWS !!!



Ramadhan Penuh Berkah, Bapas Samarinda Gelar Yasinan Bersama Klien Pemasyarakatan dan Peserta Magang

Samarinda, (26/02/2026) – Dalam suasana bulan suci Ramadhan yang penuh berkah, Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda menggelar kegiatan yasinan bersama klien pemasyarakatan dan peserta magang sebagai bagian dari pelaksanaan program bimbingan kepribadian. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dilaksanakan di aula Bapas Samarinda dan diikuti dengan penuh antusias oleh para klien serta peserta magang. Momentum Ramadhan dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat nilai spiritual dan pembinaan mental bagi seluruh peserta.

Bapas Samarinda | Balai Pemasyarakatan Samarinda | @bapassamarinda | Balai Pemasyarakatan Samarinda

BAPERINDA
NEWS !!!



Kabapas Samarinda Teken PKS Bersama Pemkab Kutai Barat Dukung Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2023

Samarinda, (26/02/2026) – Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas) Kelas I Samarinda melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) sebagai bentuk sinergi dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh komitmen dan semangat kolaborasi antarinstitusi guna memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Bapas Samarinda | Balai Pemasyarakatan Samarinda | @bapassamarinda | Balai Pemasyarakatan Samarinda

BAPERINDA
NEWS !!!



Bapas Samarinda Ikuti Sosialisasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2026

Samarinda, 31/03/2026 – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Samarinda mengikuti kegiatan Sosialisasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara daring.

Bapas Samarinda | Balai Pemasyarakatan Samarinda | @bapassamarinda | Balai Pemasyarakatan Samarinda

BAPERINDA
NEWS !!!



Bapas Samarinda Gelar Bimbingan Tahap Awal bagi Klien Pemasyarakatan

Samarinda, (14/04/2026) – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Samarinda melaksanakan kegiatan bimbingan tahap awal bagi klien pemasyarakatan sebagai bagian dari proses pembimbingan dan pendampingan pasca putusan pengadilan. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah klien baru yang berada di bawah pengawasan Bapas dan bertujuan untuk memberikan pemahaman awal terkait hak, kewajiban, serta program pembimbingan yang akan dijalani.

Bapas Samarinda | Balai Pemasyarakatan Samarinda | @bapassamarinda | Balai Pemasyarakatan Samarinda









